Pemerintah
Kabupaten Nunukan
KECAMATAN SEIMANGGARIS

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SEI MENGGARIS

2027

SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dimaksudkan sebagai:
   a. dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Arah Kebijakan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2027; dan
   b. bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah oleh masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
(2) Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
   a. rencana stategis Perangkat Daerah; dan
   b. rencana kerja Pemerintah Daerah.
(3) Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan secara elektronik pada sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
   c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
   d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
   e. BAB V : PENUTUP.

(2) Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RENJA

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja Pemerintah Daerah berkenan; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
   a. rancangan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
   b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

(4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 13 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RADEN IWAN KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris tahun 2027 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Sei Menggaris dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2027.

Penyusunan Renja Kecamatan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis dan operasional yang melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Renja Kecamatan Sei Menggaris tahun 2027 ini berisi tentang arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan dapat terwujud sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Kecamatan Sei Menggaris.

Nunukan, 08 Juli 2026
Camat,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN SEI MENGGARIS

ANWAR SAID, S.IP
Pembina TK.I IV/b
Nip. 197012162002121004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI..... **iii**

BAB I. PENDAHULUAN..... **1**

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1,2. LANDASAN HUKUM..... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... **7**

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD..... 7

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD..... 25

2.3, ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD..... 27

2.4, REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 28

2.5, PENELAHAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN MASYARAKAT..... 29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... **30**

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 27

3.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN..... 31

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... **35**

BAB V. PENUTUP..... **45**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahunlalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran daridokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD sertadilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RENJA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2027 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan/sub kegitan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan/sub kegiatan, analisis kinerja pelayanan kecamatan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan/sub kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidangKewilayahan.

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan Kecamatan dalam bidang Kewilayahan dalam rangka mewujudkanVisi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2025 – 2029 yaitu **“ Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera ,Adil dan Mandiri “.**

Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai Rencana StrategisKecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029 tahun ke-2, dan memuat rencana program dan kegiatan/sub kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut (N+1).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Tentang Kelurahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 580);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara:80/9/2021).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah KabupatenNunukan Tahun 2021 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah;

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2027
- Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2027

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei MenggarisKabupaten Nunukan Tahun 2027 adalah :

- Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan yang termuat dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama dibidang Kewilayahan.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan..

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Sebatik Tengah, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Tengah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan

Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Memuat tentang Telahaan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Seimanggaris

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEI MENGGARIS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada SKPD Kantor Kecamatan Seimanggaris Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan Rencana Kerja diaplikasikan melalui beberapa program dan kegiatan. Dan Dalam penyusunan Renja 2027 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2026.

Berikut disajikan data alokasi anggaran Renja 2026, Dimana pagu rancangan awal Renja 2026 sebelumnya Adalah sebesar Rp. 3.105.235.794,00, dan diakomodir sebesar Rp. 2.377.547.902,00.

Tabel.01 Ranwal RENJA 2026 Kec. Seimanggaris

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA (RENJA) 2026	PAGU (Rp) TAHUN 2026	
				RENJA AWAL	RENJA PERUBAHAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	KECAMATAN SEIMANGGARIS			**3.105.235.794,00**	**2.377.547.902,00**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (100%)	100%	2.929.263.794,00	2.275.443.197,00
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	12 Dokumen	62.032.268,00	48.148.738,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.683.910,00	4.740.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	9.683.910,00	7.110.000,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.593.910,00	3.080.000,00

1.1.4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	22.724.628,00	20.872.828,00
1.1.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	12.345.910,00	12.345.910,00
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	19 Laporan	2.268.153.227,00	1.609.006.100,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.233.469.317,00	1.574.322.190,00
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	34.683.910,00	34.683.910,00
1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	4 Laporan	226.208.860,00	114.842.520,00
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.301.000,00	1.804.000,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	64.900.000,00	52.000.000,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	26.309.950,00	16.786.610,00
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporam	130.697.910,00	44.251.910,00
1,4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	12 Laporan	321.980.112,00	321.976.512,00
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	279.980.112,00	279.976.512,00
1,5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Unit	50.889.327,00	181.469.327,00
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	36.056.947,00	26.436.947,00
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14.832.380,00	4.992.380,00
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	150.040.000,00

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (100 %)	100%	18.847.820,00	8.461.955,00
2,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4 Laporan	9.423.910,00	4.600.000,00
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	9.423.910,00	4.600.000,00
2,2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	9.423.910,00	3.861.955,00
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9.423.910,00	3.861.955,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (100%)	100%	47.951.230,00	25.027.865,00
3,1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	4 laporan	9.423.910,00	4.711.955,00
3.1.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	9.423.910,00	4.711.955,00
3,2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga	4 Laporan	38.527.320,00	20.315.910,00
3.2.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	20 Keluarga	9.423.910,00	4.701.955,00
3.2.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	29.103.410,00	15.613.955,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (100 %)	100%	6.653.910,00	4.201.955,00
4,1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Lembaga	6.653.910,00	4.201.955,00

4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6.653.910,00	4.201.955,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (100%)	100%	79.942.130,00	46.831.020,00
5,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	4 Laporan	79.942.130,00	46.831.020,00
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	20 Orang	62.494.130,00	42.839.020,00
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	17.448.000,00	3.992.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (100%)	100%	22.576.910,00	17.581.910,00
6,1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Desa	22.576.910,00	17.581.910,00
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12.873.000,00	7.878.000,00
6.1.2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	9.703.910,00	9.703.910,00

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Kecamatan Seimanggaris Tahun 2026, dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub keiatannya mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029. Alokasi anggaran sebagaimana yang telah diakomodir dalam DPA SKPD Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel diatas, dan realisasi sampai dengan Triwulan II (30 Juni 2026) daat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.02. Rekapitulasi Realisasi Belanja TW II 2026

URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI s/d TW II 2026	%
BELANJA DAERAH	**2.377.547.902,00**	**1.274.740.308,00**	**53,61**
BELANJA OPERASI	**2.325.547.902,00**	**1.274.740.308,00**	**54,81**
Belanja Pegawai	1.574.322.190,00	1.060.062.150,00	67,33
Belanja Barang dan Jasa	751.225.712,00	214.678.158,00	28,57
BELANJA MODAL	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	**2.377.547.902,00**	**1.274.740.308,00**	**53,61**

Selengkapnya realisasi anggaran belanja langsung per program dan Kegiatan/SubKegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kab. Nunukan TA. 2026 sampai dengan masa Semester 1 atau Triwulan II 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel.03
Realisasi Anggaran Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN		
			(Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	Keuangan (%)
1	***2***		***3,00***	***7,00***	***8,00***	***9***
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**2.275.443.197,00**		**1.270.740.308,00**	55,85
1	**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**48.148.738,00**	62,12	**22.603.050,00**	46,94
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.740.000,00	66,67	-	0,00
	2	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7.110.000,00	62,50	-	0,00
	3	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3.080.000,00	100,00	1.750.000,00	56,82
	4	*Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	20.872.828,00	100,00	20.853.050,00	99,91

	5	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD*	12.345.910,00	100,00	-	0,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1.609.006.100,00**		**1.079.642.150,00**	
	6	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.574.322.190,00	62,00	1.060.062.150,00	67,33
	7	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	34.683.910,00	58,33	19.580.000,00	56,45
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**114.842.520,00**		**14.380.000,00**	
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.804.000,00	100,00	-	0,00
	9	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	52.000.000,00	20,00	-	0,00
	10	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	16.786.610,00	50,00	-	0,00
	11	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	44.251.910,00	50,00	14.380.000,00	32,50
4	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**321.976.512,00**		**149.120.108,00**	
	12	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	42.000.000,00	50,00	9.410.000,00	22,40
	13	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	279.976.512,00	50,00	139.710.108,00	49,90
5	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**181.469.327,00**		**4.995.000,00**	
	14	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	26.436.947,00	50,00	4.995.000,00	18,89
	15	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	4.992.380,00	44,44	-	0,00
	16	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	150.040.000,00	30,00	-	0,00
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***		**8.461.955,00**		**2.250.000,00**	
6	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**4.600.000,00**		**-**	
	17	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4.600.000,00	50,00	-	0,00
7	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat***		**3.861.955,00**		**2.250.000,00**	
	18	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	3.861.955,00	50,00	2.250.000,00	58,26
3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***		**25.027.865,00**		**-**	
8	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***		**4.711.955,00**		**-**	
	19	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	4.711.955,00	50,00	-	0,00
9	***Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan***		**20.315.910,00**		**-**	

	20	*Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*	4.701.955,00	50,00	-	0,00
	21	*Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	15.613.955,00	50,00	-	0,00
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		**4.201.955,00**		**1.750.000,00**	
10	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		**4.201.955,00**		**1.750.000,00**	
	22	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4.201.955,00	50,00	1.750.000,00	41,65
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***		**46.831.020,00**		**-**	
11	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***		**46.831.020,00**		**-**	
	23	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	42.839.020,00	71,43	-	0,00
	24	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	3.992.000,00	25,00	-	0,00
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***		**17.581.910,00**		**-**	
12	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		**17.581.910,00**		**-**	
	25	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	7.878.000,00	50,00	-	0,00
	26	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	9.703.910,00	50,00	-	0,00
TOTAL PAGU			**2.377.547.902,00**	**57,32**	**1.274.740.308,00**	**53,62**

Anggaran Belanja Operasi pada Kecamatan Sei Menggaris dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program rutin dan 5 (Lima) program pembangunan/ teknis, antara lain:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Dari tabel diatas dapat dilihat Pagu Anggaran Kecamatan Seimanggaris Tahun 2026 yang diakomodir adalah sebesar Rp. 2.377.547.902,00 dan realisasi target kinerja dan anggaran Kecamatan Seimanggaris sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 1.274.740.308,00 atau 53,62%.

Beberapa hal yang perlu disampaikan terait dengan realisasi Renja 2026 sampai dengan Semester 1 atau Triwulan II 2026 (Per 31 Juni 2026), sebagai berikut:

1. Rendahnya serapan anggaran pada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis dan Penunjang, disebabkan alokasi persediaan dana (SPD) terbatas, sedangkan SPD belanja Pegawai tidak mencukupi kebutuhan, sehingga SPD lainnya dialihkan untuk memenuhi kebutuan belanja pegawai sampai dengan Juni 2026
2. Sesuai dengan estimasi dan perhitungan, belanja ;
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan Desember 2026 ±Rp.2.122.229.741,00, sehinggga dari nilai pagu Murni 2026 Rp. 1.574.322.190,00, atau masih kekurangan Rp. 547.907.551,00, yang haarapannya dapat terpenuhi pada Anggaran Perubahan 2026 saat ini.
    2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, juga terdapat kekurangan pagu yang diharapkan. Pagu murni 2026 sebesar Rp. 279.976.512,00, sedangka kebutuhan hingga Desember 2026 ± Rp. 282.196.800,00 atau kekurangan Rp.2.220.288,00.

Sehingga dapat dipastikan pada Tahun Anggaran 2027 mendatang, permasalahan kekurangan anggaran belanja pegawai sebagaimana tersaji diatas, akan terulang kembali.

Selanjutnya Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat dari berbagai indikator pada tabel berikut;

Tabel. 04
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
KEC. SEI MENGGARIS KABUPATEN NUNUKAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

No		Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		KECAMATAN			**17.339.918.087**		**3.346.900.402**		**2.377.547.902**		**653.592.630**		**621.147.678**						**1.274.740.308**		**1.274.740.308**	**12**	**7,35**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**16.357.274.491**		**3.231.527.102**		**2.275.443.197**		**649.592.630**		**621.147.678**						**1.270.740.308**		**1.270.740.308**	**13**	**7,77**	KEC. SEI MENGGARIS
		Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100		100		100		34,39		62,12						62,12		62,12		62,1	0	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			361.791.548		18.440.000		48.148.738		22.603.050		-						22.603.050		22.603.050	15,8	6,25	
		Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel																						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			69.683.910		7.710.000		4.740.000		-		-						-		-	6,67	0	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		2		2		2		0						2		2		6,67	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			49.683.910		8.360.000		7.110.000		-		-						-		-	12,5	0	

		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	40		6		8		2		3					5		5		12,5	0	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.969.550		2.370.000		3.080.000		1.750.000		-						1.750.000		1.750.000	20	4,61	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		2		2		2		0					2		2		20	0	
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			142.724.628		-		20.872.828		20.853.050		-						20.853.050		20.853.050	20	14,61	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5		0		1		1		0					1		1		20	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			61.729.550		-		12.345.910		-		-						-		-	20	0	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	10		0		2		2		0					2		2		20	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.860.091.448		1.790.965.801		1.609.006.100		535.463.580		544.178.570						1.079.642.150		1.079.642.150	15,8	8,4	
		Tersusunya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.660.091.448		1.735.955.801		1.574.322.190		515.883.580		544.178.570						1.060.062.150		1.060.062.150	20	8,37	

		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		10		20		15		0						15		15		20	0	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			200.000.000		55.010.000		34.683.910		19.580.000		-						19.580.000		19.580.000	11,7	9,79	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60		3		12		3		4						7		7		11,7	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.131.044.300		353.256.523		114.842.520		14.380.000		-						14.380.000		14.380.000	11	1,27	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien																						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.505.000		2.353.200		1.804.000		-		-						-		-	20	0	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1		0						1		1		20	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			324.500.000		182.358.580		52.000.000		-		-						-		-	4	0	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		1		5		1		0						1		1		4	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			131.549.750		13.461.093		16.786.610		-		-						-		-	10	0	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		3		5		1		3						4		4		10	0	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			653.489.550		155.083.650		44.251.910		14.380.000		-						14.380.000		14.380.000	10	2,2	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		2		12		3		3						6		6		10	0	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.609.900.560		322.037.920		321.976.512		72.151.000		76.969.108						149.120.108		149.120.108	11,3	9,26	
		Tersusunya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif																						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			210.000.000		40.300.000		42.000.000		9.410.000		-						9.410.000		9.410.000	12,5	4,48	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48		3		12		3		3					6		6		12,5	0	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.399.900.560		281.737.920		279.976.512		62.741.000		76.969.108						139.710.108		139.710.108	10	9,98	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3					6		6		10	0	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			394.446.635		746.826.858		181.469.327		4.995.000		-						4.995.000		4.995.000	9,26	1,27	
		Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			180.284.735		486.225.300		26.436.947		4.995.000		-						4.995.000		4.995.000	20	2,77	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		5		5		6		0					6		6		20	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			74.161.900		9.146.500		4.992.380		-		-						-		-	7,78	0	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90		5		14		3		4					7		7		7,78	0	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			140.000.000		251.455.058		150.040.000		-		-						-		-	0	0	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		2		1		0		0					0		0		0		0	0	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**105.247.935**		**21.826.350**		**8.461.955**		**2.250.000**		**-**						**2.250.000**		**2.250.000**	**10**	**2,14**	KEC. SEI MENGGARIS
		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100		100		100		25		50					75		75		75	0		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			52.447.825		-		4.600.000		-		-						-		-	10	0	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																						
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			52.447.825		-		4.600.000		-		-						-		-	10	0	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20		0		4		1		1					2		2		10	0		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			52.800.110		21.826.350		3.861.955		2.250.000		-						2.250.000		2.250.000	10	4,26	
		Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			52.800.110		21.826.350		3.861.955		2.250.000		-						2.250.000		2.250.000	10	4,26	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	20		4		4		1		1					2		2		10	0		

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**267.764.014**		**-**		**25.027.865**		**-**		**-**						**-**		**-**	**18**	**0**	KEC. SEI MENGGARIS
		Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100		0		100		25		50						50		50		50	0	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			59.941.809		-		4.711.955		-		-						-		-	10	0	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan																						
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			59.941.809		-		4.711.955		-		-						-		-	10	0	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	20		0		4		1		1						2		2		10	0	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			207.822.205		-		20.315.910		-		-						-		-	22,5	0	
		Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga																						
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			57.494.809		-		4.701.955		-		-						-		-	20	0	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	50		0		20		0		10						10		10		20	0	

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			150.327.396		-		15.613.955		-		-						-		-	25	0	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100		0		50		0		25						25		25		25	0	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**37.156.036**		**86.166.950**		**4.201.955**		**1.750.000**		**-**						**1.750.000**		**1.750.000**	**0**	**4,71**	KEC. SEI MENGGARIS
		Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100		100		100		25		25						25		25		25	0	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-																	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-		-		4.201.955		1.750.000		-						1.750.000		1.750.000	0	0	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		4				2						2		2		0	0	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			37.156.036		86.166.950		-		-		-						-		-	0	0	
		Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			37.156.036		86.166.950		-		-		-						-		-	0	0	

		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	20		4		0		0		0					0		0		0	0	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**446.404.099**		**-**		**46.831.020**		**-**		**-**						**-**		**-**	**9,6**	**0**	KEC. SEI MENGGARIS
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		0		100		0		48,21					48,21		48,21		48,2	0	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			446.404.099		-		46.831.020		-		-						-		-	9,64	0	
		Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah																						
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			358.785.099		-		42.839.020		-		-						-		-	14,3	0	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	105		0		20		0		15					15		15		14,3	0	

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			87.619.000		-		3.992.000		-		-						-		-	5	0	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	20		0		4		0		1					1		1		5	0	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**126.071.511**		**7.380.000**		**17.581.910**		**-**		**-**						**-**		**-**	**10**	**0**	KEC. SEI MENGGARIS
		Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	100		100		100		29,1667		50					50		50		50	0	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			126.071.511		7.380.000		17.581.910		-		-						-		-	10	0	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			66.071.511		-		7.878.000		-		-						-		-	10	0	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	60		0		12		4		2					6		6		10	0	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			60.000.001		7.380.000		9.703.910		-		-						-		-	10	0	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	20		4		4		1		1					2		2		10	0	
																						0	0	
	JUMLAH				**17.339.918.087**		**3.346.900.402**		**2.377.547.902**		**653.592.630**		**621.147.678**						**1.274.740.308**		**1.274.740.308**			
	Rata-rata capaian kinerja (%)																					**12**	**7,35**	
	Predikat kinerja																					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Tersedianya Anggaran 2. Tersedianya SDM
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Terbatasnya persediaan dana (SPD) triwulan berjalan, khususnya belanja gaji sehingga beberapa alokasi SPD TW berjalan dialihkan 2. Pertimbangan kurangnya pagu anggaran belanja Gaji Pegawai ASN, P3K, PW dan Ooutsourchig
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Pengusulan SPD yang cukup 2. Pengajuan Penambahan Pagu SKPD pada APBD Perubahan khususnya kekurangan belanja Gaji Pegawai ASN, P3K dan PW/Outsourching
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:	1. Pengusulan kekurangan pagu SKPD khususnya Belanja Pegawai pada Renja Perubahan 2026

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEI MENGGARIS

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang berdasarkan Peraturan Mentri Dalam negeri 86 Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana urusan Kecamatan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kewilayahan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Nunukan periodetahun 2025-2029, Kecamatan Sei Menggaris memiliki tantangan untuk membantu Kepala Daerah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemantapan pembangunan perdesaan. Untuk dapat terciptanya Program tersebutdiatas maka peran serta Kecamatan Sei Menggaris dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan terhadap masyarakat dan akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan Perdesaan, pengembangan usaha ekonomi dan keuangan perdesaan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil dalam (outcomes) manfaat (benefits) dan dampak (impact). Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel.05

Pencapaian Kinerja Pelayaanan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Tahun Ke -					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke -				Proyeksi	Catatan Analisis
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				Persen	87,25	87,50	87,75	88	88,05	87,15	87,25	87,50	87,75	88	87,75

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEI MENGGARIS

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2026, dapat dikatakan hasilnya cukup Baik. Adapun isiu-isu Strategis Penyelnggaran Pemerintahan Kecamatan Sei Menggaris Sebagai Berikut :

a. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sei Menggaris, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personal;
b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses Pelayanan;
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat; dan
d. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa/kelurahan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamaan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

VISI : KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA ,ADIL DAN MANDIRI MISI 3 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima
			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel
			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif
			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan

VISI : KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA ,ADIL DAN MANDIRI MISI 3 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan penerapan SAKIP dan pengelolaan kinerja berbasis hasil yang transparan dan terukur.	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
			Penerapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja.
			Publikasi laporan kinerja secara transparan dan berkala

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027, maka program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, maka kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan, maka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan melihat aspek sosial budaya masyarakat lokal.
2. Mengoptimalkan Kerjasama antar desa untuk menikatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan kawasan perdesaan

3. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan, SDM apartur desa dan PBD
4. Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok, lembaga kemasyarakatan dan
5. Lembaga Adat di desa dalam mengelolah potensi sumber daya ekonomi

Sedangkan analisis dari aspek penganggaran atau rencana pendanaan RKPD 2027 masih didasarkan pada alokasi pagu APBD Tahun 2026 (N-1) dan menafikkan rencana penganggaran yang tertuang pada Renstra Kecamatan Seimanggaris Tahun 2025-2029. Jumlah rencana alokasi ini akan menghadapi kendala serupa yakni ***"kekurangan belanja pegawai".*** Hal ini akan berdampak pada uapaya pencapaian kinerja dan keuangan pada program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang teknis (seksi-seksi).

2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2027 disamping berpedoman pada Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 serta Tidak Mengakomodir Usulan Masyarakat tetapi hanya meneruskan kan ke OPD yang Menangani dalam Rapat Musrembang Tingkat Kecamatan, Kewilayahan Maupun Musrembang RKPD tingkat Kabupaten.

Kecamatan Seimanggaris secara adminitratif membawahi 4 Desa, dimana pelaksanaan pemerintahan memeliki kewenangannya masing-masing, sehingga dalam pengsusulan program kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat, diakomodir melalui program kegiatan tingkat Desa. Kecamatan Seimanggaris hanya berkonsentrasi memenuhi sasaran peningkatan kinerja pelayanan publik untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan dalam Renja dan Renstra Kecamatan Seimanggaris 2025-2029.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan dalammelaksanakan misi. Tujuan dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia,yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi atau dengan katalain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (dassolen) dan kenyataan (dassein) pada kurun waktu tertentu.

Adapun tujuan dari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 -2029 adalah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

3.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya alam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakanbagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Dalam merumuskan sasaran harus memperhatikan criteria SMART-C yaitu:

a. *Specific (spesifik),* yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi denganjelas,
b. *Measurable (dapat diukur),* yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas danterukur,
c. *Achievable (dapat dicapai),* yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada, *Relevant (relevan),* yakni ncerminkan keterkaitan antara target sasarandengan tujuan
d. *Time Limit (Batas waktu),* yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan , dan
e. *Continously improve (perbaikan berkelanjutan),* yakni sasaran dapat dicapaisecara bertahapSasaran merupakan bagian intergral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokuspada tindakan sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara

nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, bulanan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran strategis 2025 s/d 2029 sebagai penjabaran dari Program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada pada Kecamatan Sei menggaris Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris											
Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan ppublik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat		Indeks Pelayanan Publik(Indeks)	87,88	87,90	88,00	88,05	88,15	88,50	88,88	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	87,88	87,90	88,00	88,05	88,15	88,50	88,88	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	

3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, maka rencana program dan kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Operasi
    a. Belanja Pegawai
    b. Belanja Barang/Jasa
2. Belanja Modal
    a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program rutin Kecamatan Sei MenggarisKabupaten Nunukan bertujuan untuk Mendukung Nilai SAKIP . Adapun rincian kegiatan /sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PDKegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mendukung kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat Adapun rinciankegiatan program adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
    a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini mendukung kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat.. Adapun rincian kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    a. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
    b. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini mendukung kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat.. Adapun rincian kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    a) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian [Negara Republik Indonesia

V. Program Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ini bertujuan untuk mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat denganrincian Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

2. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

   b. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kinerja pada Tahun 202t merupakan gambaran Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan. Renja 2027 Kecamatan Seimanggaris sebagai yang telah di tetapkan di dalam Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2027 melalui PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 14 TAHUN 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sei Menggaris Kab.Nunukan Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 06

Penetapan RKPD tahun 2027 dan Perkiraan Maju 2028

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KEC. SEI MENGGARIS			**2.762.230.411,00**							**3.470.289.595,81**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.762.230.411,00**							**3.470.289.595,81**	
	7.01	**KECAMATAN**			**2.762.230.411,00**							**3.470.289.595,81**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	-	**2.762.230.411,00**						-	**3.470.289.595,81**	
		[Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD]	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya**	**100**	**2.663.967.651,00**	-	-	-	-	-	**100**	**3.273.630.198,18**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	19 Dokumen	52.734.540,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Renstra, Renja, RKA-SKPD, DPA LKPJ dan LKJiP	19 Dokumen	74.939.820,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.160.000,00	Kab. Nunukan , Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Renstra, Renja, RKA-SKPD, DPA LKPJ dan LKJiP	6 Dokumen	15.000.000,00	KEC. SEI MENGGARIS

								generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	7.110.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Renstra, Renja, RKA-SKPD, DPA LKPJ dan LKJiP	8 Laporan	10.000.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.620.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Renstra, Renja, RKA-SKPD, DPA LKPJ dan LKJiP	2 Laporan	7.593.910,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	22.656.390,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Renstra, Renja, RKA-SKPD, DPA LKPJ dan LKJiP	1 Berita Acara	30.000.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	12.188.150,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Renstra, Renja, RKA-SKPD, DPA LKPJ dan LKJiP	2 Dokumen	12.345.910,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu*	19 Laporan	2.157.749.291,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)	19 Laporan	2.599.612.079,18	KEC. SEI MENGGARIS

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.122.229.741,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)	15 Orang/bulan	2.559.612.079,18	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	35.519.550,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)		40.000.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum*	4 Laporan	95.860.020,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Laporan	226.208.860,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.707.320,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Paket	4.301.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.100.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	5 Paket	64.900.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	18.206.700,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	8 Paket	26.309.950,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	62.846.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Laporan	130.697.910,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan	324.196.800,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN/Pegawai)	4 Laporan	321.980.112,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN/Pegawai)	12 Laporan	42.000.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	282.196.800,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN/Pegawai)	12 Laporan	279.980.112,00	KEC. SEI MENGGARIS

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan barang milik daerah yang dipelihara*	4 Laporan	33.427.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional perkantoran	4 Laporan	50.889.327,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	22.882.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional perkantoran	6 Unit	36.056.947,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	10.545.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional perkantoran	18 Unit	14.832.380,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	3 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional perkantoran	3 Unit	0,00	KEC. SEI MENGGARIS
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**		**10.543.910,00**						**-**	**21.063.583,57**	
		[Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan]	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan**	**100**	**10.543.910,00**	-	-	-	-	-	**100**	**21.063.583,57**	-

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan yang Disampaikan ke Kabupaten/Kota*	4 Laporan	6.393.910,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Umum:Kecamatan Sei Menggaris	4 Laporan	10.363.583,57	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6.393.910,00	Kab. Nunukan , Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Umum:Kecamatan Sei Menggaris	4 Laporan	10.363.583,57	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan yang Disampaikan ke Kabupaten/Kota*	4 Laporan	4.150.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Sei Menggaris	4 Laporan	10.700.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4.150.000,00	Kab. Nunukan , Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Sei Menggaris	4 Laporan	10.700.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**		**15.358.500,00**						**-**	**53.588.411,84**	
		[Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat]	**Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/m ukim.**	**100**	**15.358.500,00**	-	-	-	-	-	**100**	**53.588.411,84**	-

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	4 Laporan	4.260.000,00			-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Desa	4 Laporan	12.256.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4.260.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Desa	4 Laporan	12.256.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan*	4 Laporan	11.098.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Keluarga	4 Laporan	41.332.411,84	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	5.120.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Keluarga	10 Keluarga	11.127.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20 Keluarga	5.978.500,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Keluarga	20 Keluarga	30.205.411,84	KEC. SEI MENGGARIS
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**8.066.400,00**						**-**	**7.436.148,55**	

		[Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi]	**Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi**	**100**	**8.066.400,00**	-	-	-	-	-	**100**	**7.436.148,55**	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada*	4 Lembaga	8.066.400,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Umum, Pelaku Usaha/Bisnis, Aparatur Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	4 Lembaga	7.436.148,55	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	8.066.400,00	Kab. Nunukan , Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Umum, Pelaku Usaha/Bisnis, Aparatur Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	4 Laporan	7.436.148,55	KEC. SEI MENGGARIS
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**49.474.840,00**						**-**	**89.340.185,55**	
		[Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif]	**Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**49.474.840,00**	-	-	-	-	-	**100**	**89.340.185,55**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah*	4 Laporan	49.474.840,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Umum, Pelajar danTokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Tokoh Agama	4 Laporan	89.340.185,55	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	21 Orang	39.531.240,00	Kab. Nunukan , Sei Menggar is, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Umum, Pelajar danTokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Tokoh Agama	21 Orang	71.800.185,55	KEC. SEI MENGGARIS

			Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.943.600,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Masyarakat Umum, Pelajar danTokoh Masyarakat/Tokoh Adat/Tokoh Agama	4 Dokumen	17.540.000,00	KEC. SEI MENGGARIS
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**14.819.110,00**						**-**	**25.231.068,12**	
		[Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan]	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan**	**100**	**14.819.110,00**	-	-	-	-	-	**100**	**25.231.068,12**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang difasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	4 Desa	14.819.110,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa	4 Desa	25.231.068,12	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	7.855.200,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa	12 Dokumen	13.231.068,00	KEC. SEI MENGGARIS
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	6.963.910,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang diSsabilitas.	Optimalisas i Tata kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa	4 Laporan	12.000.000,12	KEC. SEI MENGGARIS
	J U M L A H				**2.762.230.411,00**							**3.470.289.595,81**	

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2027 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorongpencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029 : "**Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri"**

Nunukan, 08 Juli 2026
Camat,



ANWAR SAID, S.IP
Pembina TK.I IV/b
Nip. 197012162002121004